

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2006
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah telah melakukan perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007;
- b. bahwa perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 pada tanggal 16 Oktober 2006;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum terdiri dari:

- a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;
 - b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun 2007 ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
 - (3) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
 - b. Untuk daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dana Alokasi Umum suatu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan atas dasar alokasi dasar dan celah fiskal.
- (3) Celah fiskal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.
- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
- (6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah termasuk kenaikan gaji pokok, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, pemberian gaji bulan ke-13, dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sarna dengan 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.

- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2007 ditetapkan tidak lebih kecil dari alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2005.
- (2) Daerah Provinsi yang menerima Dana Alokasi Umum Tahun 2007 lebih kecil dari Dana Alokasi Umum Tahun 2005 ditambah dengan dana penyesuaian murni, memperoleh tambahan dana penyesuaian.
- (3) Daerah yang menerima Dana Alokasi Umum Tahun 2007 lebih kecil dari Dana Alokasi Umum Tahun 2006, memperoleh tambahan dana penyesuaian.

Pasal 5

Rincian besamya alokasi Dana Alokasi Umum Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2006
TANGGAL 18 Desember 2006

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2007

(dalam ribuan rupiah)

NO.	DAERAH	JUMLAH
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	487.934.000
1	Kab. Aceh Barat	267.201.000
2	Kab. Aceh Besar	335.436.000
3	Kab. Aceh Selatan	277.663.000
4	Kab. Aceh Singkil	206.859.000
5	Kab. Aceh Tengah	274.186.000
6	Kab. Aceh Tenggara	252.480.000
7	Kab. Aceh Timur	285.679.000
8	Kab. Aceh Utara	203.868.000
9	Kab. Bireuen	345.885.000
10	Kab. Aceh Pidie	431.940.000
11	Kab. Simeulue	184.733.000
12	Kota Banda Aceh	308.839.000
13	Kota Sabang	171.896.000
14	Kota Langsa	193.579.000
15	Kota Lhokseumawe	211.310.000
16	Kab. Nagan Rava	221.841.000
17	Kab. Aceh Jaya	191.893.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	200.729.000
19	Kab. Gayo Lues	200.632.000
20	Kab. Aceh Tamiang	213.428.000
21	Kab. Bener Meriah	198.360.000
II	Provinsi Sumatera Utara	657.357.000
1	Kab. Asahan	546.637.000
2	Kab. Dairi	304.080.000
3	Kab. Deli Serdang	708.480.000
4	Kab. Tanah Karo	373.637.000
5	Kab. Labuhan Batu	536.778.000
6	Kab. Langkat	545.650.000
7	Kab. Mandailing Natal	338.364.000
8	Kab. Nias	343.779.000
9	Kab. Simalungun	586.985.000
10	Kab. Tapanuli Selatan	501.085.000
11	Kab. Tapanuli Tengah	259.019.000
12	Kab. Tapanuli Utara	320.942.000
13	Kab. Toba Samosir	239.982.000
14	Kota Binjai	254.241.000
15	Kota Medan	748.707.000
16	Kota Pematang Siantar	278.407.000
17	Kota Sibolga	184.634.000

18	Kota Tanjung Balai	197.642.000
19	Kota Tebing Tinggi	200.708.000
20	Kota Padang Sidempuan	225.865.000
21	Kab. Pakpak Bharat	145.900.000
22	Kab. Nias Selatan	231.315.000
23	Kab. Humbang Hasundutan	234.493.000
24	Kab. Serdang Berdagai	344.516.000
25	Kab. Samosir	202.774.000
III	Provinsi Surnatera Barat	546.332.000
1	Kab. Limapuluh Kota	344.547.000
2	Kab. Agam	377.132.000
3	Kab. Kepulauan Mentawai	236.058.000
4	Kab. Padang Pariaman	352.452.000
5	Kab. Pasaman	263.891.000
6	Kab. Pesisir Selatan	380.657.000
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	243.480.000
8	Kab. Solok	325.791.000
9	Kab. Tanah Datar	334.472.000
10	Kota Bukit Tinggi	211.433.000
11	Kota Padang Panjang	169.805.000
12	Kota Padang	565.100.000
13	Kota Payakumbuh	205.435.000
14	Kota Sawahlunto	167.833.000
15	Kota Solok	182.247.000
16	Kota Pariaman	194.522.000
17	Kab. Pasaman Barat	271.069.000
18	Kab. Dharmasraya	218.596.000
19	Kab. Solok Selatan	188.488.000
IV	Provinsi Riau	277.659.000
1	Kab. Bengkalis	206.723.000
2	Kab. Indragiri Hilir	368.790.000
3	Kab. Indragiri Hulu	235.911.000
4	Kab. Kampar	241.850.000
5	Kab. Kuantan Sengingi	272.524.000
6	Kab. Pelalawan	188.874.000
7	Kab. Rokan Hilir	91.848.000
8	Kab. Rokan Hulu	198.579.000
9	Kab. Siak	95.609.000
10	Kota Dumai	124.459.000
11	Kota Pekanbaru	327.161.000
V	Provinsi Kepulauan Riau	333.333.000
1	Kab. Bintan	152.286.000
2	Kab. Natuna	159.405.000
3	Kab. Karimun	224.259.000
4	Kota Batam	219.300.000
5	Kota Tanjung Pinang	206.735.000
6	Kab. Lingga	161.174.000
VI	Provinsi Jambi	415.018.000
1	Kab. Batanghari	237.751.000
2	Kab. Bungo	302.950.000

3	Kab. Kerinci	356.557.000
4	Kab. Merangin	310.445.000
5	Kab. Muaro Jambi	244.321.000
6	Kab. Sarolangun	240.533.000
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	230.642.000
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	205.866.000
9	Kab. Tebo	253.907.000
10	Kota Jambi	335.549.000
VII	Provinsi Sumatera Selatan	510.197.000
1	Kab. Lahat	370.487.000
2	Kab. Musi Banyuasin	190.145.000
3	Kab. Musi Rawas	410.612.000
4	Kab. Muara Enim	335.566.000
5	Kab. Ogan Komering Ilir	462.135.000
6	Kab. Ogan Komering Ulu	296.154.000
7	Kota Palembang	659.611.000
8	Kota Pagar Alam	163.339.000
9	Kota Lubuk Linggau	191.501.000
10	Kota Prabumulih	161.515.000
11	Kab. Banyuasin	384.981.000
12	Kab. Ogan Ilir	260.428.000
13	Kab. OKU Timur	326.475.000
14	Kab. OKU Selatan	224.738.000
VIII	Provinsi Bangka Belitung	319.357.000
1	Kab. Bangka	240.378.000
2	Kab. Belitung	218.195.000
3	Kota Pangkal Pinang	216.914.000
4	Kab. Bangka Selatan	190.478.000
5	Kab. Bangka Tengah	169.892.000
6	Kab. Bangka Barat	188.769.000
7	Kab. Belitung Timur	192.853.000
IX	Provinsi Bengkulu	405.858.000
1	Kab. Bengkulu Selatan	242.370.000
2	Kab. Bengkulu Utara	341.399.000
3	Kab. Rejang Lebong	291.055.000
4	Kota Bengkulu	311.197.000
5	Kab. Kaur	174.316.000
6	Kab. Seluma	209.887.000
7	Kab. Mukomuko	200.305.000
8	Kab. Lebong	183.357.000
9	Kab. Kepahiang	190.558.000
X	Provinsi Lampung	509.656.000
1	Kab. Lampung Barat	288.264.000
2	Kab. Lampung Selatan	600.921.000
3	Kab. Lampung Tengah	599.805.000
4	Kab. Lampung Utara	395.803.000
5	Kab. Lampung Timur	487.543.000
6	Kab. Tanggamus	495.346.000
7	Kab. Tulang Bawang	400.619.000
8	Kab. Way Kanan	274.211.000

9	Kota Bandar Lampung	464.191.000
10	Kota Metro	202.405.000
XI	Provinsi DKI Jakarta	119.943.000
XII	Provinsi Jawa Barat	933.436.000
1	Kab. Bandung	1.351.912.000
2	Kab. Bekasi	430.417.000
3	Kab. Bogor	962.196.000
4	Kab. Ciamis	775.730.000
5	Kab. Cianjur	757.052.000
6	Kab. Cirebon	730.886.000
7	Kab. Garut	911.801.000
8	Kab. Indramayu	610.891.000
9	Kab. Karawang	622.602.000
10	Kab. Kuningan	544.045.000
11	Kab. Majalengka	555.540.000
12	Kab. Purwakarta	366.484.000
13	Kab. Subang	560.645.000
14	Kab. Sukabumi	759.683.000
15	Kab. Sumedang	551.711.000
16	Kab. Tasikmalaya	718.561.000
17	Kota Bandung	827.608.000
18	Kota Bekasi	522.199.000
19	Kota Bogor	355.776.000
20	Kota Cirebon	304.470.000
21	Kota Depok	381.095.000
22	Kota Sukabumi	285.095.000
23	Kota Cimahi	270.848.000
24	Kota Tasikmalaya	369.950.000
25	Kota Banjar	273.232.000
XIII	Provinsi Banten	330.597.000
1	Kab. Lebak	507.639.000
2	Kab. Pandeglang	524.411.000
3	Kab. Serang	605.720.000
4	Kab. Tangerang	693.643.000
5	Kota Cilegon	223.328.000
6	Kota Tangerang	376.145.000
XIV	Provinsi Jawa Tengah	1.050.732.000
1	Kab. Banjarnegara	452.544.000
2	Kab. Banyumas	654.154.000
3	Kab. Batang	362.659.000
4	Kab. Blora	447.775.000
5	Kab. Boyolali	528.505.000
6	Kab. Brebes	657.982.000
7	Kab. Cilacap	743.064.000
8	Kab. Demak	438.288.000
9	Kab. Grobogan	563.699.000
10	Kab. Jepara	461.230.000
11	Kab. Karanganyar	459.156.000
12	Kab. Kebumen	585.365.000

13	Kab. Kendal	453.755.000
14	Kab. Klaten	694.207.000
15	Kab. Kudus	421.953.000
16	Kab. Magelang	548.521.000
17	Kab. Pati	559.748.000
18	Kab. Pekalongan	411.159.000
19	Kab. Pemalang	530.443.000
20	Kab. Purbalingga	416.181.000
21	Kab. Purworejo	471.735.000
22	Kab. Rembang	361.876.000
23	Kab. Semarang	455.990.000
24	Kab. Sragen	513.575.000
25	Kab. Sukoharjo	460.662.000
26	Kab. Tegal	550.407.000
27	Kab. Temanggung	389.124.000
28	Kab. Wonogiri	556.874.000
29	Kab. Wonosobo	389.671.000
30	Kota Magelang	235.917.000
31	Kota Pekalongan	235.899.000
32	Kota Salatiga	212.614.000
33	Kota Semarang	586.736.000
34	Kota Surakarta	374.501.000
35	Kota Tegal	220.303.000
XV	Provinsi DI Yogyakarta	437.379.000
1	Kab. Bantul	524.293.000
2	Kab. Gunung Kidul	459.851.000
3	Kab. Kulon Progo	374.760.000
4	Kab. Sleman	543.065.000
5	Kota Yogyakarta	365.042.000
XVI	Provinsi Jawa Timur	1.091.155.000
1	Kab. Bangkalan	430.851.000
2	Kab. Banyuwangi	698.228.000
3	Kab. Blitar	587.733.000
4	Kab. Bojonegoro	552.361.000
5	Kab. Bondowoso	397.430.000
6	Kab. Gresik	452.286.000
7	Kab. Jember	861.126.000
8	Kab. Jombang	532.595.000
9	Kab. Kediri	635.830.000
10	Kab. Lamongan	540.603.000
11	Kab. Lumajang	479.591.000
12	Kab. Madiun	421.464.000
13	Kab. Magetan	451.962.000
14	Kab. Malang	880.921.000
15	Kab. Mojokerto	450.454.000
16	Kab. Nganjuk	539.899.000
17	Kab. Ngawi	493.983.000
18	Kab. Pacitan	371.997.000
19	Kab. Pamekasan	410.702.000
20	Kab. Pasuruan	532.901.000
21	Kab. Ponorogo	490.926.000
22	Kab. Probolinggo	484.750.000

23	Kab. Sampang	370.902.000
24	Kab. Sidoarjo	588.073.000
25	Kab. Situbondo	383.831.000
26	Kab. Sumenep	492.667.000
27	Kab. Trenggalek	431.681.000
28	Kab. Tuban	470.385.000
29	Kab. Tulungagung	564.916.000
30	Kota Blitar	194.040.000
31	Kota Kediri	350.377.000
32	Kota Madiun	238.456.000
33	Kota Malang	417.300.000
34	Kota Mojokerto	212.039.000
35	Kota Pasuruan	203.153.000
36	Kota Probolinggo	225.555.000
37	Kota Surabaya	639.590.000
38	Kota Batu	188.025.000
XVII Provinsi Kalimantan Barat		610.890.000
1	Kab. Bengkayang	262.219.000
2	Kab. Landak	319.568.000
3	Kab. Kapuas Hulu	458.779.000
4	Kab. Ketapang	588.702.000
5	Kab. Pontianak	485.795.000
6	Kab. Sambas	395.227.000
7	Kab. Sanggau	389.605.000
8	Kab. Sintang	488.394.000
9	Kota Pontianak	369.581.000
10	Kota Singkawang	237.907.000
11	Kab. Sekadau	216.970.000
12	Kab. Melawi	256.154.000
XVIII Provinsi Kalimantan Tengah		571.290.000
1	Kab. Barito Selatan	290.368.000
2	Kab. Barito Utara	282.513.000
3	Kab. Kapuas	434.371.000
4	Kab. Kotawaringin Barat	328.975.000
5	Kab. Kotawaringin Timur	399.216.000
6	Kota Palangkaraya	299.830.000
7	Kab. Barito Timur	233.714.000
8	Kab. Murung Raya	352.655.000
9	Kab. Pulang Pisau	263.522.000
10	Kab. Gunung Mas	273.756.000
11	Kab. Lamandau	231.480.000
12	Kab. Sukamara	239.689.000
13	Kab. Katingan	349.098.000
14	Kab. Seruyan	300.900.000
XIX Provinsi Kalimantan Selatan		427.994.000
1	Kab. Banjar	339.303.000
2	Kab. Barito Kuala	263.669.000
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	267.283.000
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	263.020.000
5	Kab. Hulu Sungai Utara	218.943.000
6	Kab. Kota Baru	313.543.000

7	Kab. Tabalong	226.888.000
8	Kab. Tanah Laut	252.597.000
9	Kab. Tapin	233.526.000
10	Kota Banjar Baru	190.679.000
11	Kota Banjarmasin	361.095.000
12	Kab. Balangan	160.641.000
13	Kab. Tanah Bumbu	224.935.000
XX	Provinsi Kalimantan Timur	235.743.000
1	Kab. Berau	295.970.000
2	Kab. Bulungan	204.324.000
3	Kab. Kutai Kartanegara	297.814.000
4	Kab. Kutai Barat	331.974.000
5	Kab. Kutai Timur	273.571.000
6	Kab. Malinau	370.745.000
7	Kab. Nunukan	141.814.000
8	Kab. Pasir	173.168.000
9	Kota Balikpapan	179.471.000
10	Kota Bontang	75.718.000
11	Kota Samarinda	288.805.000
12	Kota Tarakan	72.991.000
13	Kab. Penajam Paser Utara	52.632.000
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	447.037.000
1	Kab. Bolaang Mongondow	427.184.000
2	Kab. Minahasa	337.027.000
3	Kab. Sangihe	306.399.000
4	Kota Bitung	243.233.000
5	Kota Manado	374.754.000
6	Kab. Kepulauan Talaud	221.981.000
7	Kab. Minahasa Selatan	303.705.000
8	Kota Tomohon	182.495.000
9	Kab. Minahasa Utara	227.809.000
XXII	Provinsi Gorontalo	291.394.000
1	Kab. Boalemo	174.613.000
2	Kab. Gorontalo	335.122.000
3	Kota Gorontalo	230.813.000
4	Kab. Pohuwato	192.720.000
5	Kab. Bone Bolango	196.016.000
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	502.129.000
1	Kab. Banggai	387.407.000
2	Kab. Banggai Kepulauan	236.725.000
3	Kab. Buol	219.916.000
4	Kab. Toli-Toli	274.713.000
5	Kab. Donggala	451.257.000
6	Kab. Morowali	343.480.000
7	Kab. Poso	330.252.000
8	Kota Palu	320.761.000
9	Kab. Parigi Moutong	323.158.000
10	Kab. Tojo Una Una	218.426.000
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	599.508.000
1	Kab. Bantaeng	206.737.000

2	Kab. Barru	229.246.000
3	Kab. Bone	494.234.000
4	Kab. Bulukumba	332.719.000
5	Kab. Enrekang	230.254.000
6	Kab. Gowa	379.657.000
7	Kab. Jeneponto	280.676.000
8	Kab. Luwu	289.606.000
9	Kab. Luwu Utara	268.664.000
10	Kab. Maros	286.004.000
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	266.302.000
12	Kab. Pinrang	313.755.000
13	Kab. Selayar	217.506.000
14	Kab. Sidenreng Rappang	265.277.000
15	Kab. Sinjai	255.440.000
16	Kab. Soppeng	292.386.000
17	Kab. Takalar	264.008.000
18	Kab. Tana Toraja	362.625.000
19	Kab. Wajo	305.940.000
20	Kota Pare-pare	208.125.000
21	Kota Makassar	583.842.000
22	Kota Palopo	202.459.000
23	Kab. Luwu Timur	216.885.000
XXV Provinsi Sulawesi Barat		279.253.000
1	Kab. Majene	221.772.000
2	Kab. Mamuju	313.748.000
3	Kab. Polewali Mandar	301.085.000
4	Kab. Mamasa	188.531.000
5	Kab. Mamuju Utara	163.409.000
XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara		461.841.000
1	Kab. Buton	290.634.000
2	Kab. Konawe	404.024.000
3	Kab. Kolaka	339.571.000
4	Kab. Muna	374.261.000
5	Kota Kendari	286.250.000
6	Kota Bau-bau	229.205.000
7	Kab. Konawe Selatan	275.125.000
8	Kab. Bombana	193.896.000
9	Kab. Wakatobi	181.345.000
10	Kab. Kolaka Utara	207.298.000
XXVII Provinsi Bali		436.533.000
1	Kab. Badung	263.808.000
2	Kab. Bangli	233.791.000
3	Kab. Buleleng	468.732.000
4	Kab. Gianyar	347.800.000
5	Kab. Jembrana	278.583.000
6	Kab. Karangasem	313.036.000
7	Kab. Klungkung	247.321.000
8	Kab. Tabanan	371.722.000
9	Kota Denpasar	331.448.000

XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	447.658.000
1	Kab. Bima	374.364.000
2	Kab. Dompu	262.090.000
3	Kab. Lombok Barat	420.874.000
4	Kab. Lombok Tengah	445.821.000
5	Kab. Lombok Timur	522.757.000
6	Kab. Sumbawa	365.080.000
7	Kota Mataram	287.589.000
8	Kota Bima	204.865.000
9	Kab. Sumbawa Barat	147.770.000
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	553.589.000
1	Kab. Alor	256.249.000
2	Kab. Belu	344.589.000
3	Kab. Ende	278.452.000
4	Kab. Flores Timur	271.659.000
5	Kab. Kupang	382.802.000
6	Kab. Lembata	188.166.000
7	Kab. Manggarai	348.963.000
8	Kab. Ngada	278.275.000
9	Kab. Sikka	279.124.000
10	Kab. Sumba Barat	302.572.000
11	Kab. Sumba Timur	293.655.000
12	Kab. Timor Tengah Selatan	355.802.000
13	Kab. Timor Tengah Utara	258.755.000
14	Kota Kupang	277.705.000
15	Kab. Rote Ndao	182.910.000
16	Kab. Manggarai Barat	206.094.000
XXX	Provinsi Maluku	476.048.000
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	374.271.000
2	Kab. Maluku Tengah	500.035.000
3	Kab. Maluku Tenggara	243.635.000
4	Kab. Pulau Buru	250.617.000
5	Kota Ambon	318.722.000
6	Kab. Seram Bagian Barat	256.229.000
7	Kab. Seram Bagian Timur	170.543.000
8	Kab. Kepulauan Aru	191.940.000
XXXI	Provinsi Maluku Utara	370.724.000
1	Kab. Halmahera Tengah	193.844.000
2	Kab. Halmahera Barat	191.424.000
3	Kota Ternate	244.043.000
4	Kab. Halmahera Timur	197.485.000
5	Kota Tidore Kepulauan	206.550.000
6	Kab. Kepulauan Sula	233.404.000
7	Kab. Halmahera Selatan	271.379.000
8	Kab. Halmahera Utara	240.244.000
XXXII	Provinsi Papua	876.295.000
1	Kab. Biak Numfor	309.850.000
2	Kab. Jayapura	422.740.000
3	Kab. Jayawijaya	356.119.000
4	Kab. Merauke	607.522.000

5	Kab. Mimika	221.664.000
6	Kab. Nabire	402.255.000
7	Kab. Paniai	410.794.000
8	Kab. Puncak Jaya	361.492.000
9	Kab. Yapen Waropen	251.360.000
10	Kota Jayapura	322.303.000
11	Kab. Sarmi	461.469.000
12	Kab. Keerom	270.045.000
13	Kab. Yahukimo	356.889.000
14	Kab. Pegunungan Bintang	324.659.000
15	Kab. Tolikara	277.690.000
16	Kab. Boven Digoel	398.819.000
17	Kab. Mappi	373.497.000
18	Kab. Asmat	376.173.000
19	Kab. Waropen	299.579.000
20	Kab. Supiori	182.311.000
XXXIII Provinsi Irian Jaya Barat		464.871.000
1	Kab. Sarong	261.519.000
2	Kab. Manokwari	377.745.000
3	Kab. Fak Fak	333.914.000
4	Kota Sorong	240.153.000
5	Kab. Sorong Selatan	383.109.000
6	Kab. Raja Ampat	264.871.000
7	Kab. Teluk Bintuni	287.441.000
8	Kab. Teluk Wondama	209.232.000
9	Kab. Kaimana	336.312.000
Total Provinsi		16.478.740.000
Total Kabupaten/Kota		148.308.660.000
Total Nasional		164.787.400.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO